

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perjalanan panjang telah ditempuh industri pertahanan dalam memenuhi kebutuhan sarana pertahanan. Sejak ditetapkannya Keputusan Presiden nomor 59 tahun 1983, merupakan tonggak awal cita-cita bangsa Indonesia membangun industri strategis yang bernaung di dalam suatu wadah yang disebut Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) yang mandiri dan secara politis didalamnya dimuati kepentingan pertahanan. Dengan Keppres tersebut, telah ditetapkan industri pertahanan bidang kedirgantaraan yang ditangani PT. IPTN (sekarang PT. Dirgantara Indonesia), bidang kemaritiman (ditangani PT. PAL), bidang persenjataan dan munisi (ditangani PT. Pindad) dan bidang bahan peledak (ditangani PT. Dahana). Keempat industri tersebut merupakan bagian dari sepuluh industri strategis yang antara lain PT. INKA (kereta api), PT. INTI (telekomunikasi), PT. Krakatau Steel (baja), PT. Boma Bisma Indra (kontainer dan peralatan ekspor), PT. Barata (mesin diesel) dan PT. LEN (elektronika). (Anne Kusmayati, 2005)

Sepuluh BUMNIS di atas telah mampu menghasilkan berbagai produk. PT. Pindad (Persero) telah memproduksi senjata ringan, senjata berat, munisi kaliber kecil, munisi kaliber besar, munisi khusus dan kendaraan tempur. PT. PAL Indonesia (Persero) telah mampu memproduksi Korvet, kapal patroli, landing platform dockship, Tanker, kapal pencegah bencana laut dan dok pemeliharaan

kapal perang. PT Dirgantara Indonesia (Persero) memproduksi pesawat transport sayap tetap, helikopter, pesawat patroli maritim, pesawat pengintai, simulator pesawat terbang maritim, pemeliharaan dan modifikasi pesawat. Sementara PT. LEN Industri (Persero) telah berhasil memproduksi sistem kendali untuk peralatan militer, sistem deteksi: radar dan sonar, pasok daya militer independen serta peralatan komunikasi militer.

Industri strategis adalah ujung tombak dari proses transformasi kepada masyarakat yang memiliki industri yang canggih. Oleh karenanya kesinambungan industri strategis hanya bisa dipelihara jika secara politis dikembangkan produk hukum berupa Undang-Undang atau peraturan pemerintah yang mengamankan industri strategis agar dapat terus berkembang. Penguasaan dan pengembangan sektor-sektor industri penting yang diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap negara yaitu dalam bentuk solusi terhadap pertahanan dan efisiensi anggaran negara.

BUMNIS tersebut diharapkan mampu memacu proses industrialisasi dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, yang terjadi sebaliknya, hal ini tidak tertangani dengan baik, sesuai harapan yang diinginkan dan terjadi pemborosan (*high cost*). Produk-produknya umumnya tidak mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif dibandingkan dengan produk-produk sejenis dari negara-negara lain, sehingga sulit memperoleh pasar di luar negeri. Biaya produksi sangat tinggi, sehingga harga jualnya tidak kompetitif. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain sebagian besar komponen bermuatan teknologi canggih dan bahan baku masih tergantung dari negara lain,

pengelolaan cenderung kurang efektif dan tidak efisien. SDM kurang profesional dan pengawasan kurang berjalan dengan baik. (Anne Kusmayati, 2005)

Untuk mengatasi permasalahan di atas, saat ini di Indonesia telah menerapkan peraturan bahwa perusahaan publik, bank dan BUMN wajib memiliki unit audit internal untuk membantu memastikan sistem pengendalian intern di perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Tentang BUMN, pasal 67 (1) yang menyatakan bahwa: “Pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan”. Fungsi pengawasan internal (audit internal) merupakan bagian dari sistem pengendalian intern yang handal dan bertugas membantu direksi memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha, dengan melakukan evaluasi pelaksanaan program perusahaan, memberikan saran untuk memperbaiki efektivitas proses pengendalian risiko dan melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan.

Dengan keberadaan fungsi audit internal yang efektif, dapat tercipta mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada dalam perusahaan telah digunakan secara ekonomis dan efektif, serta pengendalian yang ada dalam perusahaan dapat memberikan kepastian lebih tinggi bahwa informasi yang dihasilkan terpercaya. Audit internal juga dapat menjadi barometer standar perilaku yang berlaku di perusahaan melalui aktivitas pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan yang mendorong terciptanya iklim kerja yang efisien. Seiring dengan perbaikan dalam proses internal tersebut, keyakinan investor (termasuk kreditor) terhadap proses pengelolaan perusahaan juga akan meningkat.

Untuk itu, BUMNIS harus dapat meningkatkan efektivitas pengendalian produksi agar dapat mempertahankan perusahaan dan memperoleh keuntungan kompetitif. Setiap kegiatan yang dijalankan oleh manajemen diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana serta tercapainya efektivitas dan efisien dalam pelaksanaan kegiatan. Akan tetapi, untuk mencapai itu semua akan ada masalah-masalah yang timbul baik itu berasal dari dalam maupun dari luar lingkungan organisasi sendiri, sehingga tujuan dari organisasi akan sulit untuk tercapai. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul serta untuk mencapai tujuan organisasi maka manajemen perlu suatu sistem pengendalian yang dapat mengawasi jalannya kegiatan organisasi yang disebut dengan sistem pengendalian intern.

Pengendalian intern mempunyai tujuan untuk dapat melindungi kekayaan perusahaan dengan cara-cara meniadakan pemborosan, penyelewengan dan dapat meningkatkan efisiensi kerja dari seluruh anggota organisasi perusahaan. Tujuan pengendalian intern itu dapat tercapai bila elemen dari pengendalian itu sendiri benar-benar dilaksanakan dan agar pengendalian itu sendiri berjalan secara efektif, diperlukan suatu bagian tersendiri dalam perusahaan yang kedudukannya harus independen terhadap kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di perusahaan tersebut untuk mengawasi dan menilai keefektifan pengendalian intern. Bagian ini disebut bagian audit internal dan merupakan suatu fungsi staf yang memperoleh pendelegasian dari manajemen untuk mengawasi sistem yang ada. Staf audit internal tidak hanya dimaksudkan untuk melakukan penilaian dan audit secara independen terhadap berbagai catatan, prosedur, pelaksanaan kebijakan dan

rencana perusahaan melainkan juga untuk memberikan informasi objektif dalam bentuk saran-saran yang berguna bagi kepentingan manajemen dalam menunjang efektivitas pengendalian intern.

Dalam mencapai tujuan perusahaan, berbagai cara diterapkan pada semua bidang kegiatan perusahaan termasuk yang menyangkut masalah perencanaan dan pengendalian persediaan. Peranan audit internal sangat besar dalam hal persediaan baik barang jadi maupun bahan baku, karena persediaan merupakan salah satu aktiva yang sangat berpengaruh terhadap perusahaan dalam hal melakukan kegiatannya.

Persediaan bahan baku merupakan salah satu bentuk investasi yang hampir selalu ada pada perusahaan dan merupakan aktiva terpenting dalam menunjang kelancaran aktivitas produksi. Tanpa adanya bahan baku, aktivitas produksi tidak dapat berjalan dengan sempurna, hal ini dikarenakan bahan baku merupakan urat nadi bagi jalannya kegiatan operasional perusahaan. Dengan adanya pengendalian intern persediaan bahan baku, resiko terjadinya kesalahan dan kekeliruan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisir sehingga mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami kerugian, dengan demikian jumlah bahan baku harus tersedia, artinya bahan baku harus tetap berada pada jumlah yang telah ditetapkan.

Apabila persediaan bahan baku ini tidak dikendalikan dengan baik, maka dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan seperti kelebihan dan kekurangan bahan baku, kelebihan bahan baku dapat merugikan perusahaan karena akan mengakibatkan biaya penyimpanan menjadi besar, adanya resiko kerusakan serta

adanya resiko penurunan harga atas persediaan bahan baku. Dalam hal kekurangan bahan baku akan mengakibatkan terhambatnya produksi dan resiko menjadi naiknya harga bahan baku sehingga membutuhkan biaya yang lebih besar lagi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku ini.

Masalah yang sering muncul dalam pengendalian intern persediaan bahan baku adalah kesalahan dan kekeliruan pencatatan atau perhitungan. Akibat kesalahan ini mengakibatkan terjadinya perbedaan antara catatan persediaan dengan fisik persediaan yang ada pada perusahaan. Hal ini didukung oleh pernyataan Nadjamudin selaku Manajer Pengawasan Operasional I PT. Dirgantara Indonesia (Persero), “dimana setiap tahunnya selalu terjadi perbedaan antara catatan IRP (*Integrated Resource Planning*) dan fisik”. Hal ini terlihat dari hasil audit pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) terhadap 58 item sampel diperoleh kondisi sebagai berikut : terdapat 28 item atau 48,276% kuantitinya sama antara catatan IRP dengan fisik dan terdapat 30 item atau 51,724% kuantitinya tidak sama antara catatan IRP dengan fisik. Perbedaan antara catatan dan fisik persediaan bahan baku tersebut disebabkan oleh terjadinya perubahan sistem pencatatan persediaan bahan baku dari sistem pencatatan manual menjadi sistem pencatatan komputer yaitu IRP (*Integrated Resource Planning*), dimana sistem tersebut dibuat sendiri oleh PT. Dirgantara Indonesia dan masih memiliki kelemahan yang sampai saat ini masih dilakukan perbaikan. Selain itu, perbedaan fisik dan catatan yang terjadi juga disebabkan oleh kesalahan manusia (*human error*).

Menurut Abu Hasan selaku manajer SPI PT. LEN (Persero) mengemukakan bahwa “masalah yang terjadi pada sistem pengendalian intern persediaan bahan baku PT. LEN (Persero) adalah terjadinya perbedaan antara pencatatan dan fisik, yang disebabkan oleh terlambatnya dokumen yang sampai ketangan pegawai yang bersangkutan, hal ini berhubungan dengan kurang efektifnya pengendalian fisik”. Hal serupa juga dikemukakan oleh Karyanto selaku manajer SPI PT. INTI (Persero), bahwa “terjadi perbedaan antara pencatatan dan fisik persediaan bahan baku yang disebabkan oleh kesalahan manusia (*human error*), yaitu keterlambatan pencatatan dan kesalahan dalam pencatatan”. Berdasarkan data tersebut PT. Dirgantara Indonesia (Persero), PT. LEN (Persero) dan PT. INTI (Persero) memiliki masalah yang sama yaitu, adanya perbedaan antara pencatatan dan fisik.

Selain masalah tersebut, pada PT. Dirgantara Indonesia (Persero) terdapat masalah tentang pengelolaan persediaan bahan baku yang rusak pada saat penyimpanan digudang seperti dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Tingkat Pertumbuhan Persediaan Bahan Baku dan Bahan Baku Rusak

Tahun	Bahan Baku Rupiah	Rusak (<i>Reject</i>) Rupiah	Presentase (%)
2005	76.717.900.926	23.015.370	0,03
2006	87.656.540.698	44.093.155	0,05
2007	132.668.107.902	147.505.873	0,11
2008	164.247.668.778	242.204.077	0,15
2009	188.858.716.163	789.014.703	0,42

Sumber: Laporan Persediaan PT. Dirgantara Indonesia (Persero)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan jumlah persediaan bahan baku yang disertai juga dengan peningkatan jumlah

persediaan bahan baku yang rusak (*reject*). Jumlah persediaan bahan baku yang rusak mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2005 sampai tahun 2009 sebesar 0,03 % menjadi 0,42% karena bahan baku tersebut sudah kadaluarsa dan rusak pada saat penyimpanan. Hal tersebut terjadi karena kesalahan dalam pemesanan bahan baku yang disebabkan oleh perbedaan pencatatan persediaan dengan fisik persediaan yang ada. Selain itu juga disebabkan oleh pembatalan proses produksi. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut maka perusahaan perlu mempunyai suatu pengendalian intern persediaan bahan baku.

Sistem pengendalian intern persediaan bahan baku berbeda-beda pada setiap perusahaan. PT. Dirgantara Indonesia mempunyai sistem pengendalian internal sendiri, yaitu dengan sistem komputer dengan menggunakan aplikasi IRP (*Integrated Resource Planning*). Setiap transaksi dalam persediaan bahan baku, diproses secara komputerisasi melalui program IRP dengan prosedur perencanaan. Oleh karena itu, diperlukan staf audit internal dalam perusahaan besar seperti PT. Dirgantara Indonesia (Persero) untuk mengawasi dan menilai kehandalan dari sistem pengendalian intern persediaan bahan baku yang diterapkan oleh PT. Dirgantara Indonesia (Persero). Sedangkan pada PT. LEN (Persero) sistem pengendalian intern yang digunakan adalah sistem logistik yang diproses secara komputerisasi dan pencatatan manual berupa kartu gudang.

Walaupun pengendalian intern atas persediaan bahan baku telah ada, keberadaan audit internal tetap diperlukan karena suatu sistem mungkin akan kurang berfungsi apabila tidak ada alat untuk mengawasi dan mengevaluasi sistem tersebut. Audit internal akan memberikan bantuan bagi pimpinan dan manajemen

dalam menjaga, meningkatkan dan menilai keefektifan pengendalian intern atas persediaan bahan baku pada perusahaan tersebut. Audit internal sangat dibutuhkan perusahaan dalam pengendalian intern atas persediaan bahan baku karena apabila terjadi kesalahan dalam melakukannya, maka akan mengakibatkan keadaan yang sangat merugikan bagi perusahaan.

Pengendalian intern persediaan bahan baku merupakan suatu alat yang dapat mengendalikan seluruh aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan pengadaan dan penggunaan persediaan. Pengendalian intern persediaan bahan baku ini bertujuan agar perusahaan selalu mempunyai persediaan bahan baku dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat dalam mutu yang telah ditentukan agar jalannya produksi berlangsung dengan baik.

Teori yang menghubungkan audit internal dengan pengendalian intern, menurut Mulyadi (2002:211) adalah sebagai berikut :

Audit internal berhubungan dengan semua tahap kegiatan perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada audit atas catatan-catatan akuntansi. Untuk mencapai tujuan tersebut audit internal melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan penilaian terhadap efektivitas pengendalian intern dan mendorong penggunaan pengendalian intern yang efektif dengan biaya minimum.

Selain itu dikemukakan oleh Akmal dalam Desinta (2010:41) sebagai berikut:

Setiap kegiatan, termasuk kegiatan audit internal muncul sebagai akibat dari desakan kebutuhan. Setiap badan usaha pada umumnya akan berusaha sebaik-baiknya mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua kegiatan perlu dikendalikan dengan baik. Alat pengendalian yang dimaksud adalah sistem menyeluruh yang disebut sistem pengendalian intern, dimana audit internal merupakan salah satu unsur penting lainnya.

Berdasarkan teori tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa audit internal berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian intern. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Nadjamudin selaku Manajer Pengawasan Operasional I bahwa antara audit internal dan pengendalian intern terdapat pengaruh yang saling menunjang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merujuk kepada hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Iriyadi (2004) dengan judul “Peranan Internal Audit dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Penggajian”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa internal audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem pengendalian intern penggajian. Dalam penelitian lain, Euis Rosidah (2008) dengan judul “ Peranan Audit Operasional Dalam Menunjang Pengendalian Intern Atas Biaya Pemeliharaan Tanaman Menghasilkan (TM) Komoditi Teh”, menunjukkan bahwa audit operasional atas pengendalian intern biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan mempunyai peranan dalam terbentuknya suatu pengendalian intern yang memadai.

Selain itu, penelitian lain dilakukan oleh U. Agung Sagala (2010) dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Obat-Obatan Terhadap Efektifitas Pengendalian Intern Persediaan Obat-Obatan”, menunjukan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi persediaan berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian intern persediaan obat-obatan sebesar 68,72% dan sisanya 31,28% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini yaitu audit internal. Namun yang membedakan dari penelitian

sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada objek dan subjek penelitian yaitu pengendalian intern persediaan bahan baku pada perusahaan yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pengendalian intern persediaan bahan baku, dengan judul "Pengaruh Audit Internal Terhadap Efektivitas Pengendalian Intern Persediaan Bahan Baku pada BUMN Industri Strategis di Kota Bandung".

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang akan diteliti dan akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan audit internal pada BUMN Industri Strategis di Kota Bandung.
2. Bagaimanakah efektivitas pengendalian intern persediaan bahan baku pada BUMN Industri Strategis di Kota Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh audit internal terhadap efektivitas pengendalian intern persediaan bahan baku pada BUMN Industri Strategis di Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh audit internal terhadap efektivitas pengendalian intern persediaan bahan baku pada BUMN Industri Strategis di Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan audit internal pada BUMN Industri Strategis di Kota Bandung.
2. Efektivitas pengendalian intern persediaan bahan baku pada BUMN Industri Strategis di Kota Bandung.
3. Besarnya pengaruh audit internal terhadap efektivitas pengendalian intern persediaan bahan baku pada BUMN Industri Strategis di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah penulis paparkan di atas, maka penelitian ini diharapkan akan bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dapat tercapai setelah melaksanakan penelitian ini antara lain :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan sebagai salah satu sumber informasi atau pengetahuan dalam hal pengaruh dari pelaksanaan audit internal terhadap efektivitas pengendalian internal persediaan bahan baku pada BUMN Industri Strategis di Kota Bandung dan sekaligus juga sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu audit.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak BUMN Industri Strategis di Kota Bandung sebagai informasi mengenai seberapa besar pengaruh

dari pelaksanaan audit internal pengendalian internal persediaan bahan baku dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga diharapkan perusahaan dapat mewujudkan efektivitas pengendalian persediaan bahan baku.

